

# The Influence Of Competence And Internal Control System On Fraud In DPUTR Sumedang District

Muhammad Recky Alfirdaus<sup>1</sup>, Ayi Srie Yuniawati<sup>2</sup>, Anita Dwi Utami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sebelas April

[muhammadrecky.feb@unsap.ac.id](mailto:muhammadrecky.feb@unsap.ac.id)<sup>1</sup>, [asyuniawati.feb@unsap.ac.id](mailto:asyuniawati.feb@unsap.ac.id)<sup>2</sup>, [anitadwi.feb@unsap.ac.id](mailto:anitadwi.feb@unsap.ac.id)<sup>3</sup>

---

## Article Info

### Article history:

Received May 20, 2025

Revised Aug, 18 2025

Accepted Sep 30 2025

### Keywords:

Competence,  
Internal  
Control System,  
Fraud.

## ABSTRACT

*Fraud cases in the public sector are increasing and have an impact on state losses and decreased public trust in government institutions. This phenomenon also occurs in local government agencies, including in project and financial management at the agency. This study aims to analyze the effect of competence and internal control system on fraud, both partially and simultaneously, at the Public Works and Spatial Planning Office of Sumedang Regency. This research uses a quantitative approach with a survey method. Data was collected through a questionnaire of 40 respondents with a saturated sample technique. The results showed that competence has a significant effect on fraud that employees with high competence have the ability to understand and exploit the system if not accompanied by integrity, as well as the internal control system has a significant effect the findings indicate that even though the internal control system has been implemented, fraud still occurs due to weak implementation and supervision, this shows that an internal control system that is administrative in nature is not sufficient to prevent fraud. Simultaneously, both variables have an effect on fraud prevention. This finding shows that the combination of the two can create an environment that allows fraud to occur if the internal control system is weakly implemented.*



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Muhammad Recky Alfirdaus,  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,  
Jalan Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang 45322.  
Email: [muhammadrecky.feb@unsap.ac.id](mailto:muhammadrecky.feb@unsap.ac.id)

---

## 1. INTRODUCTION

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan proyek utilitas publik masih menjadi sorotan penting di Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW, 2024), proyek-proyek seperti pengairan, penerangan, perumahan, dan pembangunan jalan rentan terhadap praktik kecurangan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki alokasi anggaran yang besar. Salah satu contoh nyata dari kasus tersebut terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2019, Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan Kepala DPUTR bersama sejumlah pejabat dan rekanan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Keboncau–Kudawangi. Dugaan kolusi, mark-up harga, hingga manipulasi dokumen pengadaan mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Kasus serupa juga ditemukan pada tahun 2022 hingga 2024, di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya kelebihan pembayaran senilai Rp754 juta pada sejumlah proyek infrastruktur. Meski dana tersebut telah dikembalikan ke kas daerah, temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan keuangan. Selain itu, praktik penyalahgunaan aset dan peralatan proyek semakin menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sistemik.

Berbagai temuan tersebut mengindikasikan adanya persoalan internal yang cukup serius, khususnya terkait rendahnya kompetensi aparatur dan lemahnya sistem pengendalian internal. Beberapa proyek infrastruktur menunjukkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian. Dalam konteks inilah, risiko *fraud* dapat muncul, terlebih ketika tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi—sebagaimana dijelaskan dalam *Fraud Triangle Theory*—tidak dapat ditekan dengan baik.

Upaya pencegahan *fraud* tidak hanya memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif, tetapi juga membutuhkan aparatur yang kompeten dan berintegritas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN diwajibkan untuk terus mengembangkan kompetensinya agar relevan dengan tuntutan organisasi. Kompetensi yang dimaksud meliputi pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi yang tinggi dapat menurunkan niat individu untuk melakukan *fraud*, karena individu yang kompeten cenderung menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.

Sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam mencegah kecurangan di lingkungan organisasi. Dengan sistem yang kuat, organisasi dapat membangun mekanisme pemantauan yang efektif dan mempersempit peluang terjadinya penyimpangan. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik mampu menurunkan tingkat kecurangan secara signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di DPUTR Kabupaten Sumedang**. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemilihan objek penelitian, yaitu instansi pemerintahan di tingkat kabupaten, yang selama ini masih minim dijadikan fokus utama dalam studi serupa.

### 1. *Agency Theory*

Agency Theory pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent, di mana principal memberikan mandat kepada agent untuk menjalankan tugas serta mengambil keputusan atas nama principal (Purba, 2023). Dalam konteks ini, terjadi pemisahan kepemilikan dan pengelolaan, yang menimbulkan potensi konflik kepentingan antara kedua pihak.

Teori ini tidak hanya relevan dalam sektor swasta, tetapi juga dalam sektor publik. Pemerintah sebagai agent memiliki akses penuh terhadap informasi, sementara masyarakat sebagai principal hanya menerima informasi yang disampaikan. Ketimpangan informasi ini dikenal sebagai *information asymmetry*, yang berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan (Fitriani, 2021).

Dalam penelitian ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) bertindak sebagai agent, sedangkan Pemerintah Daerah berperan sebagai principal.

### 2. *Fraud*

*Fraud* merupakan tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan atau menghindari sanksi hukum dengan cara menyembunyikan fakta, yang berdampak merugikan organisasi maupun individu (Suhardi et al., 2022). Dalam praktiknya, *fraud* tidak terjadi tanpa sebab, tetapi didorong oleh kombinasi tiga faktor utama yang dijelaskan dalam *Fraud Triangle Theory* oleh Arens et al. (2014), yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Tekanan dapat berasal dari masalah pribadi seperti kebutuhan ekonomi atau gaya hidup. Kesempatan muncul akibat lemahnya pengendalian internal dan minimnya sanksi. Sementara itu, pembenaran terjadi ketika pelaku meyakini bahwa tindakannya dapat diterima atau layak dilakukan.

Bentuk *fraud* diklasifikasikan dalam empat kategori utama menurut Karyono (2013), yaitu: (1) kecurangan laporan keuangan, yang mencakup manipulasi informasi akuntansi; (2) penyalahgunaan aset, seperti penggunaan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi; (3) korupsi, yang meliputi suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan; serta (4) kecurangan berbasis komputer, seperti perusakan data atau pengabaian kontrol sistem. Sejalan dengan itu, Rahmatika (2020) dan Suratman & Meinarsih (2021) menyatakan bahwa *fraud* merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang dilakukan dengan cara tersembunyi, manipulatif, dan bertujuan menipu demi keuntungan pribadi.

Untuk meminimalkan potensi *fraud*, organisasi perlu menerapkan strategi pencegahan yang meliputi deteksi dini risiko, penguatan pengendalian internal, serta tindakan hukum terhadap pelaku (Suhardi et al., 2022).

### 3. *Kompetensi*

Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaan secara tepat dan unggul, berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki (Edison et al., 2022). Kompetensi tidak hanya

berkaitan dengan apa yang diketahui, tetapi juga mencakup bagaimana individu menerapkan keahlian dan nilai-nilai internalnya dalam menyelesaikan tugas (Widyaningrum, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompetensi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar. Faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi antara lain motivasi, pengalaman, keyakinan diri, serta kemampuan berpikir analitis dan konseptual. Rahadi et al. (2021) menambahkan bahwa kompetensi juga mencerminkan karakteristik pribadi yang mendorong keberhasilan dalam bertindak dan bersikap.

Kompetensi yang tinggi sangat penting dalam lingkungan birokrasi. Wulandari (2021) mengungkapkan bahwa aparaturnya yang kompeten cenderung memiliki integritas tinggi dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan *fraud*. Hal serupa disampaikan oleh Rohmah (2023), bahwa kompetensi aparaturnya desa menjadi faktor penting dalam pencegahan tindakan kecurangan.

Secara umum, Edison et al. (2022) mengklasifikasikan tiga unsur utama kompetensi, yaitu: pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan; keahlian, yaitu kemampuan teknis dan pemecahan masalah dalam pekerjaan; serta sikap, yang mencakup etika kerja, tanggung jawab, dan perilaku profesional dalam menjalankan tugas.

#### **4. Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, seperti efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Arens et al., 2015). Dalam konteks pemerintahan, SPI diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang mendefinisikan SPI sebagai proses integral dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi, mulai dari pimpinan hingga pegawai, dalam upaya mencapai akuntabilitas dan efisiensi publik.

Menurut Koerniawan (2021), SPI juga berperan dalam mendeteksi kesalahan, mengurangi risiko bisnis, dan menjaga kepatuhan hukum. SPI yang efektif memperhitungkan manfaat dan biaya, perkembangan teknologi informasi, serta kesesuaian dengan struktur dan fungsi organisasi. Selain itu, SPI dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia serta nilai-nilai seperti integritas dan etika kerja (Utary & Ikbali, 2014; Karyono, 2021).

Karyono (2021) mengidentifikasi lima unsur utama SPI, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, yang mencakup integritas dan struktur organisasi; (2) penilaian risiko, melalui identifikasi dan mitigasi risiko operasional; (3) aktivitas pengendalian, seperti otorisasi dan evaluasi kinerja; (4) informasi dan komunikasi, untuk memastikan distribusi data yang relevan; dan (5) pemantauan, untuk mengevaluasi efektivitas sistem secara berkala.

Penelitian oleh Wulandari (2021) dan Rohmah (2023) menunjukkan bahwa penerapan dan kepatuhan terhadap SPI terbukti signifikan dalam mencegah terjadinya *fraud*, khususnya dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa. SPI berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mampu meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan integritas organisasi.

## **2. METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Desain penelitian yang diterapkan adalah eksplanatori, bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen (kompetensi dan sistem pengendalian internal) terhadap variabel dependen (pencegahan *fraud*). Desain ini sesuai untuk menguji pengaruh langsung dan simultan antar variabel dalam konteks organisasi sektor publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Kuntadi, Meilani, & Velayati (2023), desain eksplanatori kuantitatif efektif dalam “mengidentifikasi besarnya pengaruh antar variabel dengan pendekatan statistik inferensial pada sektor pemerintahan”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh, karena jumlah populasi relatif kecil dan dapat dijangkau sepenuhnya, yaitu sebanyak 40 orang. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian Asril, Taufik, & Silalahi (2024) yang juga menggunakan sampel jenuh dalam konteks aparaturnya pemerintahan dengan menyatakan bahwa “jumlah responden yang terbatas memungkinkan penggunaan total sampling untuk menjaga akurasi pengukuran”.

Instrumen penelitian disusun dalam bentuk kuesioner tertutup menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari “sangat tidak setuju” (1) hingga “sangat setuju” (5). Penyusunan indikator dilakukan berdasarkan teori kompetensi oleh Edison et al. (2022), model sistem pengendalian internal COSO sebagaimana dijelaskan oleh Karyono (2021), serta *fraud* menurut Karyono (2021). Uji Validitas isi instrumen dikaji menggunakan korelasi product moment Pearson. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan software SPSS versi 25.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk memahami profil responden dan kecenderungan jawaban, serta analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji asumsi klasik dilakukan melalui uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Langkah ini sejalan dengan Utami, Kristiantari, & Miati (2023) yang menyebutkan bahwa “pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum menginterpretasikan hasil regresi agar hasil analisis bersifat robust dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik”. Selanjutnya dilakukan uji determinasi ( $R^2$ ), koefisien korelasi ( $r$ ), serta uji signifikansi (uji  $t$  dan uji  $F$ ) untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 25.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### 1. Results

##### 3.1.1 Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana butir-butir pertanyaan dalam kuesioner mampu secara tepat mengukur konstruk yang dimaksud. Validitas dalam penelitian ini diuji dengan teknik korelasi Pearson Product Moment, menggunakan bantuan software SPSS versi 25. Dengan jumlah responden sebanyak 40 orang, maka nilai  $r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% ( $df = 38$ ) adalah 0,312. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka item dinyatakan valid.

*Tabel 3.1.1 Uji Validitas*

| Variabel                          | Jumlah Item | Item Valid | Item Tidak Valid |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Kompetensi (X1)                   | 7           | 7          | 0                |
| Sistem Pengendalian Internal (X2) | 17          | 17         | 0                |
| <i>Fraud</i> (Y)                  | 12          | 12         | 0                |

**Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025**

Hasil uji validitas terhadap variabel kompetensi (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan *fraud* (Y) menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel. Oleh karena itu, semua item pada variabel Y juga dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi internal dari instrumen penelitian, yaitu sejauh mana item-item dalam kuesioner menghasilkan hasil yang konsisten ketika digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.

*Tabel 3.1.2 Uji Reliabilitas*

| Variabel                          | Jumlah Item | Cronbach's Alpha |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| Kompetensi (X1)                   | 7           | 0,695            |
| Sistem Pengendalian Internal (X2) | 17          | 0,852            |
| <i>Fraud</i> (Y)                  | 12          | 0,796            |

**Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025**

Berdasarkan hasil tersebut, instrumen untuk variabel Kompetensi (X1) memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,695 menunjukkan reliabilitas yang memadai, variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) menunjukkan reliabilitas yang baik dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,852. Instrumen untuk variabel *Fraud* (Y) memiliki reliabilitas yang cukup dengan nilai 0,796.

##### 3.1.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap variabel kompetensi (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan pencegahan *fraud* (Y). Analisis ini menggunakan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi, yang dihitung berdasarkan hasil kuesioner dari 40 responden menggunakan SPSS versi 25. Interpretasi rata-rata dilakukan dengan membandingkan skor aktual dengan skor maksimum teoritis berdasarkan jumlah butir pernyataan dan skala Likert 5 poin. Skor maksimum teoritis untuk variabel kompetensi adalah 35, sistem pengendalian internal 75, dan *fraud* 60.

*Tabel 3.1.3 Analisis Deskriptif*

| Descriptive Statistics |    |         |         |       |                |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
|                        | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
| Kompetensi             | 40 | 25      | 34      | 29,63 | 2,084          |
| SPI                    | 40 | 59      | 77      | 70,73 | 5,033          |
| <i>Fraud</i>           | 40 | 44      | 57      | 51,40 | 3,629          |
| Valid N (listwise)     | 40 |         |         |       |                |

**Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025**

Berdasarkan Tabel 4.54 diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 sampel. Berikut penjelasan untuk masing-masing variabel:

1. Variabel kompetensi (X1) memiliki skor minimum sebesar 25 dan skor maksimum sebesar 34, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,63 serta standar deviasi sebesar 2,08. Karena nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya ( $29,63 > 2,08$ ), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keseragaman dalam jawaban antar responden, atau dengan kata lain, perbedaan antar responden tidak terlalu signifikan.
2. Variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki skor minimum sebesar 59 dan skor maksimum sebesar 77, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 70,73 serta standar deviasi sebesar 5,03. Karena nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya ( $70,73 > 5,03$ ), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keseragaman dalam jawaban antar responden, atau dengan kata lain, perbedaan antar responden tidak terlalu signifikan.
3. Variabel *fraud* (Y) memiliki skor minimum sebesar 44 dan skor maksimum sebesar 57, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 51,40 serta standar deviasi sebesar 3,62. Karena nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dibandingkan standar deviasinya ( $51,40 > 3,62$ ), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keseragaman dalam jawaban antar responden, atau dengan kata lain, perbedaan antar responden tidak terlalu signifikan.

### 3.1.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi tidak mengalami penyimpangan data yang dapat memengaruhi validitas hasil. Pengujian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200, yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Multikolinearitas mengacu pada adanya korelasi tinggi antar variabel independen yang dapat mengganggu kestabilan model regresi. Dalam pengujian ini, nilai Tolerance sebesar 0,888 dan VIF sebesar 1,126 untuk kedua variabel independen (kompetensi dan sistem pengendalian internal) menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak terjadi, karena  $Tolerance \leq 0,05$  dan  $VIF \geq 5$ .

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah residual memiliki varians yang konstan. Pengujian menggunakan metode scatterplot dengan memeriksa sebaran titik-titik residual. Hasil menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi ketika residual satu observasi berkorelasi dengan residual observasi lain. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson*, yang menghasilkan nilai sebesar 1,871. Karena nilai ini berada dalam rentang 1,6 sampai 2,4, maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

### 3.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 3.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| (Constant)                | 16,141                      | 8,550      |                           | 1,888 | ,067 |
| 1 Kompetensi              | ,560                        | ,251       | ,322                      | 2,230 | ,032 |
| SPI                       | ,264                        | ,104       | ,366                      | 2,537 | ,016 |

a. Dependent Variable: *Fraud*

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

$$Y = 16,141 + 0,560X_1 + 0,264X_2$$

Dimana:

Y = *Fraud*

X<sub>1</sub> = Kompetensi

X<sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Internal

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah:

1. Konstanta sebesar 16,141 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) adalah nol, maka nilai  $Y$  (pencegahan *fraud*) sebesar 16,141.
2. Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,560 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel kompetensi akan meningkatkan nilai pencegahan *fraud* sebesar 0,560, dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,264 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada sistem pengendalian internal akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,264, dengan asumsi variabel lain konstan.

### 3.1.5 Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan sebagai suatu alat untuk mengetahui arah dan seberapa kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih.

Tabel 3.1.5 Analisis Koefisien Korelasi

| Correlations |                     |            |        |              |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------------|
|              |                     | Kompetensi | SPI    | <i>Fraud</i> |
| Kompetensi   | Pearson Correlation | 1          | ,335*  | ,444**       |
|              | Sig. (2-tailed)     |            | ,035   | ,004         |
|              | N                   | 40         | 40     | 40           |
| SPI          | Pearson Correlation | ,335*      | 1      | ,474**       |
|              | Sig. (2-tailed)     | ,035       |        | ,002         |
|              | N                   | 40         | 40     | 40           |
| <i>Fraud</i> | Pearson Correlation | ,444**     | ,474** | 1            |
|              | Sig. (2-tailed)     | ,004       | ,002   |              |
|              | N                   | 40         | 40     | 40           |

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

hasil koefisien korelasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat hubungan antara variabel kompetensi ( $X_1$ ) dengan *fraud* ( $Y$ ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang menunjukkan nilai sebesar 0,444 dengan arah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi, maka semakin tinggi pula *fraud* yang dilakukan.
2. Tingkat hubungan antara variabel kompetensi ( $X_1$ ) dengan sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang menunjukkan nilai sebesar 0,335 dengan arah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi, maka semakin tinggi pula upaya sistem pengendalian internal yang dilakukan.
3. Tingkat hubungan antara variabel sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) dengan *fraud* ( $Y$ ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang menunjukkan nilai sebesar 0,474 dengan arah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi pula *fraud* yang dilakukan.

### 3.1.6 Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap *fraud*.

Tabel 3.1.6 Analisis Koefisien Korelasi

| Model Summary <sup>b</sup>                 |                   |          |                   |                            |               |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1  | ,562 <sup>a</sup> | ,316     | ,279              | 3,081                      | 1,871         |
| a. Predictors: (Constant), SPI, Kompetensi |                   |          |                   |                            |               |
| b. Dependent Variable: <i>Fraud</i>        |                   |          |                   |                            |               |

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

Diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,316, yang berarti bahwa variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh sebesar 31,6% terhadap *fraud*. Sementara itu, sisanya sebesar 68,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### 3.1.7 Uji Hipotesis

#### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n - k - 1 = 40 - 2 - 1 = 37$ , diperoleh nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,026. Hasil uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.7 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       | Sig. |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      | t     |      |
| (Constant)                | 16,141                      | 8,550      |                           | 1,888 | ,067 |
| 1 Kompetensi              | ,560                        | ,251       | ,322                      | 2,230 | ,032 |
| SPI                       | ,264                        | ,104       | ,366                      | 2,537 | ,016 |

a. Dependent Variable: *Fraud*

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

1. Variabel  $X_1$  (Kompetensi):  $t_{\text{hitung}} = 2,230$ ,  $p\text{-value} = 0,032$ . Karena  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  dan  $p\text{-value} > 0,05$ , maka secara parsial, kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.
2. Variabel  $X_2$  (Sistem Pengendalian Internal):  $t_{\text{hitung}} = 2,537$ ,  $p\text{-value} = 0,016$ . Karena  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  dan  $p\text{-value} < 0,05$ , maka secara parsial, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

#### b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan derajat kebebasan  $df_1 = k = 2$  dan  $df_2 = n - k - 1 = 37$ , serta tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 3,25.

Tabel 3.1.8 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

| ANOVA <sup>a</sup> |                |    |             |       |                   |
|--------------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model              | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
| 1 Regression       | 162,422        | 2  | 81,211      | 8,556 | ,001 <sup>b</sup> |
| Residual           | 351,178        | 37 | 9,491       |       |                   |
| Total              | 513,600        | 39 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: *Fraud*

b. Predictors: (Constant), SPI, Kompetensi

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

Hasil uji F menunjukkan  $F_{\text{hitung}} = 8,556$  dengan  $p\text{-value} = 0,001$ . Karena  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  dan  $p\text{-value} < 0,05$ , maka secara simultan, kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

## 2. Discussion

### 3.2.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  untuk variabel kompetensi sebesar 2,230 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,032, Karena nilai probabilitas (0,032) lebih besar dari 0,05 atau  $t_{\text{hitung}}$  (2,230) lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}}$  (2,026), maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, kompetensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang. Temuan ini bertolak belakang dengan pandangan umum bahwa kompetensi memperkuat integritas. Dalam konteks ini, kompetensi justru membuka peluang (opportunity) bagi individu untuk mengeksploitasi kelemahan sistem, sebagaimana dijelaskan dalam *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey. Pegawai yang kompeten cenderung memahami alur kerja organisasi secara menyeluruh, termasuk celah sistem yang dapat dimanfaatkan secara tidak etis. Tanpa integritas dan moralitas yang kuat, kompetensi dapat menjadi alat untuk menutupi atau menyembunyikan *fraud*. Hasil ini sejalan dengan Gracia dan Kurnia (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi dapat digunakan baik untuk mendeteksi maupun menyamarkan kecurangan, tergantung pada integritas individu. Demikian pula, Wicaksono (2022) menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, kompetensi justru dapat meningkatkan potensi penyimpangan.

### 3.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 2,537 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016, Karena nilai probabilitas (0,016) lebih kecil dari 0,05 atau  $t_{\text{hitung}}$  (2,537) lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  (2,026), maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, sistem

pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun SPI telah diterapkan secara formal, implementasi di tingkat operasional masih lemah. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan internal, rendahnya pemahaman pegawai terhadap prosedur, serta minimnya komitmen pimpinan terhadap penegakan sistem, menyebabkan SPI tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, sistem ini cenderung menjadi simbol administratif semata, menciptakan *false sense of security* di lingkungan organisasi. Penelitian oleh Kurniawan (2021) mendukung hasil ini, dengan menekankan bahwa SPI yang tidak ditindaklanjuti secara substansial justru menciptakan celah terjadinya *fraud*. Hal serupa juga disampaikan oleh Yahya dan Venusita (2022), yang menyatakan bahwa kegagalan SPI sering kali disebabkan oleh inkonsistensi pelaksanaan dan rendahnya integritas dalam pengawasan.

### **3.2.3 Hubungan Kompetensi Dengan Sistem Pengendalian Internal**

Hasil uji koefisien korelasi menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,0335 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara kompetensi dan sistem pengendalian internal. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,335 menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan rendah, yang berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik pula pelaksanaan sistem pengendalian internal. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal tidak hanya bergantung pada prosedur tertulis, tetapi juga pada kualitas pelaksana sistem, yaitu kompetensi pegawai dalam organisasi.

### **3.2.4 Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Fraud***

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji simultan atau uji F yang diperoleh, hasil probabilitas  $value = 0,001 < 0,05$  atau  $F_{hitung} 8,556 > F_{tabel} = 3,25$ , maka hipotesis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, kompetensi dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan SPI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* sebesar 31,6% pada DPUTR Kabupaten Sumedang. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel saling berinteraksi, dan kombinasi antara kompetensi tinggi tanpa etika serta SPI yang lemah menciptakan lingkungan yang rentan terhadap *fraud* (*fraud enabling environment*). Hal ini diperkuat oleh temuan Yahya dan Venusita (2022), yang menekankan pentingnya integrasi SPI secara menyeluruh agar dapat berfungsi secara optimal.

## **4. CONCLUSION (10 pt)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa pegawai dengan kompetensi tinggi memiliki kemampuan untuk memahami dan mengeksplorasi sistem jika tidak disertai integritas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perlu dibarengi dengan penanaman nilai etika dan akuntabilitas.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam konteks implementasi yang belum optimal. Meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan, *fraud* tetap terjadi karena lemahnya pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang bersifat administratif saja tidak cukup untuk mencegah kecurangan.
3. Hubungan antara kompetensi dengan sistem pengendalian internal bersifat positif dengan tingkat kekuatan rendah. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi maka semakin baik sistem pengendalian internal yang dijalankan, dan sebaliknya.
4. kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Kombinasi keduanya dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya *fraud* apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, penguatan integritas individu dan efektivitas sistem perlu berjalan beriringan.

## **ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing di Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas April atas segala bimbingan, dukungan, dan arahan yang telah diberikan selama proses penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memungkinkan penulis menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga bimbingan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di masa yang akan datang.

## REFERENCES

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing & Jasa Assurance pendekatan terintegrasi edisi kelimabelas jilid 1* (H. Wibowo & T. Perti (eds.); 15th ed.). Penerbit Erlangga.
- Asril, A. K., Taufik, T., & Silalahi, S. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 15(4 SE-Articles), 893–901. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i04.78903>
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). ALFABETA BANDUNG.
- Enny, M. W. M. S. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Vol. 1).
- Fitriani, D, A. (2021). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*. [digilib.uinsa.ac.id/47895/2/Dea Alvia Fitriani\\_G72217056.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/47895/2/Dea%20Alvia%20Fitriani_G72217056.pdf)
- Gracia, G., & Kurnia, R. (2021). The determinant factors affecting auditors' ability to detect fraud: Empirical study at public accounting firms in Jakarta and Tangerang. *Economics, Management and Sustainability*, 6(2), 132–145. <https://doi.org/10.14254/jems.2021.6-2.10>
- Indonesian Corruption Watch. (2024). *Laporan tahunan ICW 2024: Potret Korupsi Proyek Infrastruktur Publik*. Jakarta: ICW Press.
- Karyono. (2021). *Forensic Fraud* (D. Hardjono (ed.)). Andi Publisher.
- Kharie, S. M., & Darwis, H. (2024). Moderation of internal control system in the relationship between internal auditor competence and organizational justice of fraud prevention. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 9(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i1.30059>
- Koerniawan, I. (2021). *Auditing Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi* (E. Endaryati (ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Kompas. (2022). *Kejaksaaan Tetapkan Kepala DPUTR Sumedang sebagai Tersangka Korupsi Jalan*. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Kompas. (2024). *BPK Temukan Kelebihan Bayar Proyek Jalan di Sumedang*. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1458>
- Kurniawan, F. (2021). *Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, kompetensi, keadilan organisasi, penegakan standar, asimetri informasi terhadap kecenderungan fraud pada perbankan*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Purba, R, Br. (2023). *Teori Akuntansi*. Merdeka Kreasi Group.
- Rohmah, N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Atas Dana Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Sragen). In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Issue I). <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6596/>
- Utami, N. W. D., Kristiantari, D. A., & Miati, N. L. P. M. (2023). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 20–25. <https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7617.20-25>
- Yahya, F. A., & Venusita, L. (2022). The effect of internal control on fraud prevention based on the cause factors: Empirical study on a construction company in Surabaya. *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF)*, 3(2), 133–148. <https://doi.org/10.37715/jaef.v3i2.2662>
- Wulandari, N. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa* [University Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32852>